

**Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di
DPRD Kota Makassar**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS Oleh: NEGERI

AGUSTIAWAN
NIM. 10400113079
MAKASSAR

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

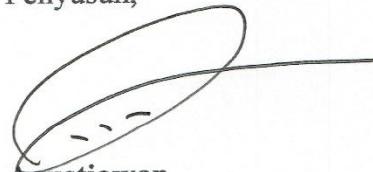
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustiawan
NIM : 10400113079
Tempat/tgl. Lahir : Sinjai, 28 Agustus 1994
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perumahan Samata Residence Blok B No 5
Judul :Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
di DPRD Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 26 Agustus 2017
Penyusun,






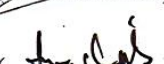


Agustiawan
NIM: 10400113079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar”, yang disusun oleh Agustiawan, NIM : 10400113079, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 24 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum. (.....)	
Munaqisy I	: Dr. Hj. Sohrah, M. Ag. (.....)	
Munaqisy II	: Awaliah Musgamy, S. Ag, M. Ag. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag. (.....)	
Pembimbing II	: Dr. H. Abdul Wahid Haddade, L. C, M. HI.(.....)	

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tak lupa pula saya kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebiadaban ke alam yang berperadaban seperti saat sekarang ini.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda H.Abdul.Kadir.S.IP dan Ibunda HJ.Sitti Normah. S.Pd, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun demikian, namun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga

kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar beserta bapak Dr.Achmat Musyahid Idrus,M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum;
3. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Abdul Wahit Haddade,L.C., M.HI . selaku pembimbing II., di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
4. Kepada Pihak Sekertariat DPRD KOTA MAKASSAR yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian, membimbing, mengarahkan dan memberikan Penulis berbagai literatur yang sesuai dengan keperluan penulis.
5. Kepada penguji Ibu Dr. Hj. Sohrah, M.Ag. Dan Ibu Awaliah Musgamy, S.Ag, M.Ag Selaku penguji I dan II yang telah memberikan komentar dan berbagai masukan terhadap skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Besar Ikatan Alumni Smansa Sinjai Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi banyak dalam

memberikan khazanah pengetahuan, Pengalaman dan Bantuan Kepada Penulis.

7. Kepada Keluarga Besar Hippmas Dpc Sinjai Utara dan seluruh kader yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Dan juga Kepada Keluarga Besar Sahabat Rakyat Sinjai yang selama ini telah memberikan semangat agar dapat bisa menyelesaikan studi
8. BEM FSH UIN Alauddin Makassar Periode 2014/2015,
9. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dan melancarkan penulisan skripsi penulis.
10. Terimah kasih juga kepada sepupu saya Hardiani, yang telah memberikan semangat selama saya menyusun skripsi ini, dan kepada Sahabat-Sahabat seperjuangan sally Ramadani, Abd. Rahamat, Ridwan, Irfan, Rifai, Ifan, Asfar M Nur, Indrah Ardiansyah.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan PMH 2013 yang Tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan canda dan tawa serta bantuan disetiap kesulitan selama penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 54 Kecamatan uluere

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT

.Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak baik yang telah disebut maupun yang tak sempat disebutkan.

Samata, 26 agustus 2017

Penulis

AGUSTIAWAN



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Peraturan Daerah (PERDA)	8
B. Defenisi Partai Politik	10
C. Partisipasi Politik	13
D. Perempuan dan Partai Politik.....	16
E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
BAB IV PERAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MAKASSAR	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanita Terlibat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	48
C. Peran Wanita dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar	55
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah dan alifatauya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamar butah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Agustawan

Nim : 10400113079

Judul : Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar

Skripsi ini membahas tentang partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD kota Makassar, selanjutnya diramu ke dalam sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan harus terlibat dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD kota Makassar? 2). Bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Peraturan daerah di kota Makassar?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh dari wakil DPRD Kota Makassar yaitu Indira Mulyasari Pramastuti Ilham, Melani Mustari Hj. Fatma Wahyuddin, Hj Haslinda dan Yeni Rahman selaku anggota DPRD perempuan di kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 1). Faktor faktor yang menyebabkan keikutsertaan perempuan dalam proses politik bahkan setidaknya menduduki jabatan DPRD kota Makassar didasarkan 3 hal yakni landasan yuridis bahwa keikutsertaan perempuan dalam proses politik hingga menduduki jabatan DPRD berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan secara sosiologis keberadaan perempuan di DPRD Kota Makassar merupakan salah satu bentuk emansipasi wanita, dan secara filosofis bahwa keberadaan perempuan di DPRD Kota Makassar adalah bentuk keadilan dari segi perwakilan karena dengan keberadaan perempuan di DPRD maka aspirasi perempuan akan betul-betul di perjuangkan. 2). Bahwa urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan perempuan hanya di mengerti oleh sesama perempuan, sehingga peran perempuan dalam membentuk peraturan daerah sangat urgent agar kepentingan-kepentingan perempuan juga terserap dalam perda tersebut. Salah satu peran anggota DPRD perempuan dengan menjadi ketua pansus pembentukan peraturan daerah tentang air susu ibu (ASI).

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi kepada seluruh anggota DPRD perempuan di kota Makassar agar lebih meningkatkan kinerjanya serta skripsi ini juga diharapkan mampu menjadi referensi untuk seluruh kaum perempuan agar tertarik ikut serta dalam proses perpolitikan utamanya ikut bertarung dalam pemilihan anggota DPRD untuk memperjuangkan hak-hak, aspirasi dan kesejahteraan perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara Republik Indonesia, Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Frase pasal 27 diatas memberikan sebuah kepastian bahwa dalam hal pemerintahan dan hukum baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, termasuk berhak memegang jabatan dalam sistem pemerintahan tanpa adanya pengecualian terhadap pandangan mengenai perbedaan gender. Hal tersebut juga sangat sejalan dengan prinsip agama islam, dimana islam menghendaki adanya persamaan antar manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, yang menjadi pembeda diantara mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan Negara lain di dunia. Pada dasarnya kedudukan warga Negara bagi Negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h.152

Bidang Hukum dan Pemerintahan di jelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28d UUD 1945 yang berbunyi: Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa warga Negara mempunyai hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk turut serta ambil bagian dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama dan hak untuk dipilih dan memilih.² Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan yang berada di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara dalam mendapat perlindungan hukum.³

Undang-undang Hak Asasi Manusia UU RI No 39 tahun 1999 memberikan bagian khusus terhadap hak-hak perempuan di mana dalam pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan dan pasal 49 di mana perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, seperti yang kita ketahui bahwa hak setiap warga negara dalam politik pemerintahan adalah hak memilih dan hak

² Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 98.

dipilih. Hak memilih bisa digaris bawahi adalah keaktifan dalam pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak kepada seluruh warga negara.

Keikutsertaan Perempuan dalam bidang politik diciptakan demi mewujudkan cita-cita demokrasi perwakilan dengan menciptakan keseimbangan komposisi perwakilan antara laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen khususnya. Karena apabila mandat diberikan kepada kaum laki-laki saja itu tidak akan mewakili seluruh rakyat yang pada dasarnya masyarakat terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan, yang masing-masing di antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kebutuhan yang tidak selalu sama, sehingga seperti dalam permasalahan perempuan dianggap perempuanlah yang memberikan solusi terhadap permasalahan perempuan tersebut. Hal ini terjadi karena sangat kecil peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan karena laki-laki tidak mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan.⁴

Di Daerah Makassar partisipasi Perempuan dalam sistem perpolitikan sudah mulai nampak, terbukti dengan beberapa orang perempuan yang berhasil menduduki jabatan penting dalam pemerintahan seperti wakil ketua DPRD kota Makassar yang dijabat oleh Indira Mulyasari Paramastuti dan masih banyak lagi jabatan penting yang dipegang oleh perempuan sebagai pengambil kebijakan terpenting dalam suatu institusi.

⁴Harmona Daulay. *Perempuan Dalam Kemelut Gender* (Medan : USU Press, 2007), h.35

Keterlibatan Perempuan dalam jabatan Politik seperti halnya DPRD merupakan bentuk manifestasi UU partai politik dan salah satu wujud dari kesetaraan Gender. DPRD merupakan lembaga yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah membuat Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda yang akan berlaku bagi suatu daerah tertentu sesuai dengan Wilayah DPRD tersebut, Jika ia duduk di DPRD Provinsi maka Perda yang ia buat akan berlaku untuk semua orang yang ada dalam provinsi tersebut, jika DPRD Kota/Kabupaten maka Perda tersebut akan berlaku untuk semua orang yang berada dalam kota/Kabupaten tersebut.

Partisipasi perempuan dalam pembuatan Perda dianggap akan membawa aspirasi/ mewakili aspirasi dari seluruh lapisan perempuan, karena untuk urusan perempuan maka perempuan pulalah ahlinya, sehingga dengan keterlibatan perempuan dalam pembentukan Perda maka diharapkan isi Perda tersebut betul-betul mengandung keadilan tanpa adanya perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan.

Dari pemaparan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut sejauh mana peran dan partisipasi perempuan dalam perpolitikan dengan judul **“Partisipasi perempuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD kota Makassar”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah sejauh manakah partisipasi perempuan dalam pembentukan Perda di DPRD Kota Makassar.

Adapun deskripsi Fokus yaitu :

1. Partisipasi yaitu turut serta, atau perihal turut berperan dalam suatu hal.
2. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, apat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁵
3. Pembentukan Perda adalah pembentukan/peranangan peraturan daerah oleh anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
4. DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah.⁶

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dari latar Belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas mengenai Bagaimana Partisipasi perempuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD kota Makassar yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan harus terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar?
2. Bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Makassar?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

⁶<http://Artikelpengertianmakalah.blogspot.Co.Id/2015/05/Pengertian-Dprd-Tugas-Wewenang-Hak-Dan.Html/> Diakses Pada Pukul 20.00 (18 Oktober 2016).

melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Buku yang dikarang oleh Siti Musdah Mulia dengan judul menuju kemandirian Politik perempuan (upaya mengakhiri depolitisasi perempuan di indonesia) merupakan suatu buku yang relevan dengan skripsi ini. Dalam buku ini membahas berbagai hak-hak perempuan menurut aturan hukum positif dan juga menurut agama, dalam buku ini pula dijelaskan berbagai ketidakadilan gender serta dijelaskan hak-hak politik perempuan menurut perspektif gender. Dalam buku ini pula dijelaskan bagaimana politik demokrasi dalam perspektif gender merupakan jalan untuk meraih kesetaraan dan keadilan gender yang seutuhnya.

Sebuah Karya Tulis yang di buat oleh Evi Mulyasari Akmul dengan judul Analisis keterlibatan perempuan dalam jabatan Politik di kabupaten wajo. Sebuah karya tulis yang meneliti mengenai keikutsertaan perempuan dalam hal perpolitikan di kabupaten wajo. Dalam penelitian ini mengungkap berbagai alasan dan kenyataan keikutsertaan perempuan serta mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi penyebab perempuan terlibat dalam jabatan politik. Dalam karya tulis ini juga diteliti mengenai penyebab kurangnya perempuan yang turut serta dalam partisipasi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Titien Agustina dengan judul Perjalanan Perempuan Indonesia dalam “Mengejar” Kuota Kursi Parlemen. Skripsi ini berisi tentang Kebijakan affirmative action melalui pemberian kuota kursi parlemen 30% telah dilalui sebanyak 3 kali Pemilihan legislatif (Pileg) 2004, 2009, dan 2014, namun belum bisa mencapai keterwakilan yang diinginkan. Masih sedikit perempuan yang

terjun ke dunia politik. Selain peran elit partai yang cukup dominan, sistem rekrutmen calon legeslatif yang lemah, pendidikan politik juga yang masih sangat kurang, serta masih kentatnya sistem kekerabatan (oligarki) dan maraknya transaksional, membuat perempuan tidak banyak tertarik terjun ke politik. Hal tersebut menjadikan dunia politik bukan pilihan perempuan. Akibatnya, lemahnya minat dan keinginan perempuan terjun ke politik mengakibatkan makin jauhnya kuota keterwakilan perempuan di parlemen.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan harus terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Makassar?

Selain tujuan di atas, Penulis berharap skripsi ini juga memiliki kegunaan, adapun kegunaannya adalah :

1. Agar mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan harus terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar?
2. Agar mengetahui Bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Makassar?

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang sangat penting karena dengan adanya Peraturan Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai landasan yang kokoh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah baik yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilandasi azas desentralisasi dewasa ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, diantaranya kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).¹ Peraturan daerah terdiri atas Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, pemerintah daerah dan DPRD harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat daerah setempat untuk menjamin terpenuhinya aspirasi masyarakat. Dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah serta DPRD dengan masyarakat setempat dalam pembentukan suatu

¹Lihat UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

peraturan daerah. Pemerintah daerah serta DPRD harus menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum menetapkan suatu peraturan daerah agar kebijakan yang ditetapkan memenuhi aspirasi masyarakat.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²

Dalam membentuk suatu Perda, maka harus memperhatikan materi muatan dalam Perda tersebut. Dalam pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Perundang-Undang yang lebih tinggi.³

Konsepsi Ranperda memuat pokok materi yang akan iatur yaitu :

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan.
2. Sasaran yang akan diwujudkan.
3. Pokok-pokok pikiran, objek atau lingkup yang akan diatur.
4. Jangkauan dari arah pengaturan.

Konsepsi Ranperda tersebut dilakukan pengharmonisansian pementapan program Ranperda yang diterima dengan pimpinan unit-unit kerja pemrakarsa

² Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 37.

³ Lihat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

program dan pimpinan kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM oleh Biro Hukum.⁴

Dalam pembentukan Perda yang terdiri dari tahap Perencanaan, Pembahasan, Pengundangan dan sosialisasi maka partisipasi publik juga dibutuhkan agar mereka bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan inti muatan dari Perda yang dibuat oleh DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

B. Definisi Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

⁴ Makalah direktur perancangan peraturan perundang-undangan ditjen peraturan perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Suharyono, pengaturan tentang penyusunan dan pengelolaan prolegda, disampaikan pada temu konsultasi panitia Legislasi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Hukum dan HAM, pada 27-29 maret 2007.

⁵ Lihat UU No 2 Tahun 2011 pengganti UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

kedudukan politik—(biasanya) dengan cara konstituil—untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶

Sigmund Neumann seperti dikutip Miriam Budiardjo, memberikan definisi partai politik sebagai:

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.”⁷

Partai berbeda dengan gerakan (movement) dan juga partai berbeda dengan kelompok penekan (pressure group)—yang dewasa ini lebih dikenal sebagai kelompok kepentingan. Gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi, gerakan sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Garamedia, 1985) H. 160-161

⁷ Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) hal 16-17

instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Selain itu organisasi kelompok kepentingan lebih bersifat longgar dibandingkan partai politik.⁸

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sistem politik negara demokrasi. Miriam Budiardjo menjelaskan secara rinci fungsi partai politik dalam negara demokratis :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik bertugas menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik melakukan “penggabungan kepentingan” (interest aggregation), yaitu menampung dan menggabung pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok yang kemudian akan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Selanjutnya pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, disetujui proses “perumusan kepentingan” (interest articulation).

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).

⁸ Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai.*, h. 162

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.⁹

C. Partisipasi politik

Banyak ahli politik di dunia yang mencoba mendefinisikan makna serta maksud dari partisipasi politik. Mereka juga mencoba menguraikan landasan dan syarat sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah partisipasi politik.

Sementara itu, Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.¹⁰

Norman H. Nie dan Sidney Verba yang dikutip oleh Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai:

⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, h.163-164

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, h. 1-2

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.” (by political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take.)¹¹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson seperti dikutip Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.” (by political participation we mean activity by private citizens designed to influenced governmental decision making. Participations may be individual or collective, organized or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective).¹²

Afan Gaffar mengkategorikan peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat secara lebih jelas dalam bentuk-bentuk yang berikut ini :

1. Electoral activity

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum.

2. Lobbying

¹¹ Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, h.2

¹² Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, h.3

Tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Organizational activity

Keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan publik.

4. Contacting

Partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung (mendatangi tempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik baik dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya.

5. Violence

Cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengrusakan (by doing physical damage) terhadap barang ataupun individu.¹³

Berbagai hal mendasari seseorang untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam politik. Hal ini seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Gabriel A. Almond

¹³ Afan Gaffar, *Menampung partisipasi Politik Rakyat, JSP* (Gadjah Mada University press, 1997) Volume 1, Nomor 1, hal 9-11

bahwa disamping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomik juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih berpartisipasi daripada perempuan; orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.¹⁴

D. Perempuan dan Partai Politik

Gender menjadi isu yang mengemuka pasca orde baru, isu-isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik umumnya seakan tidak pernah hilang. Apalagi di era reformasi. Hal ini karena momentumnya dianggap tepat untuk mengadakan perubahan di segala bidang, termasuk relasi gender. Istilah ketimpangan gender sudah menjadi bahasa baku yang artinya pasti dikaitkan dengan kondisi perempuan yang terpuruk, tertinggal, ter subordinasi dan istilah terkait lainnya. Alasannya cukup logis, perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlah yang sangat besar, bahkan diseluruh dunia melebihi jumlah laki-laki. Akan tetapi, jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik jumlahnya selalu berada jauh di bawah laki-laki utamanya dalam bidang politik, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia, termasuk di negara-negara maju.¹⁵

Guna mencapai keterwakilan luas dalam kehidupan Publik, perempuan harus mempunyai kesetaraan penuh dalam melaksanakan kekuatan politik. Mereka harus dilibatkan secara penuh dan setara dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat berkontribusi bagi pencapaian tujuan kesetaraan, pembangunan, dan

¹⁴ Mohtar Mas'ood & Dr. Colin MacAndrews. Ed. *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal 49

¹⁵ Ismah Tita Ruslin, *Pemikiran Politik Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 252.

perdamaian. Alasan sehingga penting melibatkan perempuan dalam kehidupan publik untuk memastikan kepentingan mereka dilindungi dan untuk memenuhi jaminan bahwa penikmatan hak asasi manusia adalah bagi semua orang, perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan yang penuh penting karena tidak hanya bagi pemberdayaan tapi juga bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Salah satu contoh dalam membangun nilai persamaan itu dalam bagian ini dijelaskan dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yaitu melihat manusia sama sebagai ciptaan Allah tanpa membeda-bedakannya, apalagi mendiskriminasi yang satu dengan yang lainnya berdasarkan suku, ras, atau jenis kelamin. Karena pada hakekatnya yang membuatnya berbeda adalah nilai ketakwaan terhadap Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah S.a.w bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ رواه (مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian.” (HR. Muslim)¹⁷

Karena itu dalam Islam, diskriminasi terhadap perempuan khususnya di ranah publik, merupakan sebuah penyimpangan atas nilai-nilai tauhid yang menjadi landasan beragama bagi umat Islam.¹⁸

¹⁶ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 96.

¹⁷ Muslim, *Kitab Al Birr Wash Shilah Wal Adab, Bab Tahrim Dzulmin Muslim*, No.2564.

¹⁸ Ismah Tita Ruslin, *Pemikiran Politik Indonesia*, h. 256.

Politik identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik. Akibatnya makin sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam kancah ini. Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi-institusi politik, semakin mempersempit ruang gerak, sekaligus suara perempuan yang terwakili. Kondisi inilah yang tidak menguntungkan bagi perempuan, tidak saja bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan di arena politik negara, tetapi juga tidak optimalnya artikulasi politik dan kepentingan perempuan.

Usaha untuk memperjuangkan jumlah perempuan duduk di lembaga parlemen dan pemerintahan, dilakukan agar keterwakilan jumlah dan suara perempuan seimbang dalam Negara ini. Namun, hasil yang diperoleh hanya sebatas kuantitas atau numerik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuantitas ini belum memadai dibandingkan dengan kualitas suara dan peran-peran strategis perempuan sebagai pengambil kebijakan di domain politik.¹⁹

Untuk itu perlu ada terobosan melalui komitmen keberpihakan sementara yang makin serius dan menguatkan terhadap kebijakan *Affirmative Action* ini. *Affirmative action* (kebijakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. *Affirmative action* (kebijakan afirmatif) juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih

¹⁹Henry Subiako dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.182.

representatif. Tujuannya adalah guna meningkatkan jumlah dan mutu keterwakilan perempuan di parlemen dan pada berbagai lembaga lainnya sebagai bagian dari penentu kebijakan publik yang menyangkut diri dan kehidupan “masyarakat perempuan” di negeri ini. Melalui legislatiflah berbagai kebijakan publik itu dihasilkan dan perempuan harus masuk/berperan, sebagai subjek yang ikut memutuskan, bukan hanya menjadi sasaran/objek dari berbagai kebijakan yang dihasilkan. Sehingga politik praktis menjadi sarana utama yang akan menjembatani berbagai bidang pembangunan yang responsif gender. Kesempatan perempuan untuk terjun dalam dunia politik, yaitu dengan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, merupakan hal yang positif. Keterlibatan perempuan yang semakin besar dalam kancah politik dan kesempatan mereka yang lebih terbuka untuk menjadi calon anggota legislatif akan memungkinkan perempuan ikut serta secara lebih leluasa melakukan pendidikan politik kepada warga Negara lainnya.

Dengan terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif ini akan menjadikan kaum perempuan semakin mudah memperjuangkan hak-haknya yang selama ini menjadi pihak yang terpinggirkan.

Menurut Sharon Bessel, dalam rangka untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen terdapat tiga model yang dipraktekkan: Pertama, memperluas kesempatan perempuan untuk menjadi anggota DPR melalui kebijakan- kebijakan strategis. Kedua, merancang sistem pemilu proporsional yang memberi peran parpol

untuk menempatkan calon berdasarkan nomor urut. Ketiga, memberi kuota khusus perempuan dalam pemenuhan daftar calon yang harus ditaati oleh partai politik.²⁰

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dalam pasal 15 UU No. 8 tahun 2012, Parpol peserta pemilu punya kewajiban memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan pasal 55 UU No 8 tahun 2012 pencalonan anggota DPR/D punya kewajiban memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Pada kelembagaan partai politik pun, *affirmative action* dilakukan dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur syarat mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penidirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Pemberian kuota 30%, memungkinkan kaum perempuan berkesempatan menikmati akses yang sama dan turut partisipasi dalam persoalan-persoalan Negara serta mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui sarana-sarana yang ada. Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Disini kaum perempuan harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktivitas dalam partai, sehingga *performance*-nya di situ dapat dipakai sebagai standar penilaian prestasi dan sekaligus sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sekedar

²⁰ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h.127.

belas kasihan kepada kaum perempuan. Apalagi bila hanya ”dilabelkan” sekedar kembang saja.

Partisipasi perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan proses politik pada kesehariannya, belum terlaksana dengan baik. Meskipun telah dijamin oleh undang-undang. Ini karena selain peran Parpol yang masih terlihat “setengah hati” dalam menyambut *pathner* barunya di jajaran fungsionaris, juga menyangkut diri perempuan itu sendiri.

Kepala Bidang Advokasi dan Fasilitasi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasnah Aziz, mengatakan bahwa kaum perempuan masih banyak yang belum bisa mengambil keputusan secara mandiri. Keputusan dan pilihannya dipengaruhi laki-laki, keluarga atau kelompok tertentu. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk berpartisipasi aktif di politik. Dalam artian dapat berargumentasi, berdebat, menganalisa situasi, dan mencari solusi atas suatu persoalan. Pemikiran tersebut disebabkan kebanyakan perempuan masih berpikir bahwa hubungan dengan anak-anak dan keluarga yang harmonis menjadi satu hal yang terpenting dalam hidupnya. Akhirnya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang semakin meningkat serta dorongan dari arus bawah yang menilai lambannya kemajuan yang bisa dicapai perempuan dalam kesetaraan di bidang politik ini, mendorong kuat Pemerintah melalui UU Parpol Nomor 2 tahun 2011 mengatakan bahwa Rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan

mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan dan UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 55 yang mewajibkan Parpol peserta Pemilu 2014 untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam susunan calegnya melalui model *zipper system*. Namun pada kenyataannya, hal tersebut pun masih belum bisa menjadikan perempuan bebas melenggang ke parlemen.²¹

Penetapan target keterwakilan (kuota) sebesar 30% bagi perempuan dalam pencalonan Anggota DPR di Pusat dan Daerah dimulai sejak Pemilu 2004, berlanjut pada Pemilu 2009 dan 2014 ini. Dimana Undang-undang menginstruksikan memberikan sekurang-kurangnya 30% bagi caleg perempuan, baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD yang sebagai suatu keharusan yang "harus" dipenuhi. Sejak saat itulah perempuan Indonesia sudah terkena getar gender (*genderquake*) yang mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmative action*. Salah satu strategi untuk memperbaiki ketidak-seimbangan gender di politik/parlemen adalah melalui pemberian kuota tersebut. Awalnya kuota tidak menjadi kewajiban bagi setiap partai politik untuk minimal memiliki 30 persen calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum. Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan keadaan, nampaknya strategi tersebut kurang menunjukkan hasil

²¹Titien Agustina, *Perjalanan Perempuan Indonesia dalam "Mengejar" Kuota Kursi Parlemen*, STIMI Banjarmasin, h. 5.jurnal.iain-antasari.ac.id. (Diakses 20 Oktober 2016).

yang maksimal, sehingga ikhwal kuota 30 persen ditingkatkan kadarnya menjadi wajib.²²

Agar perempuan tidak dijadikan “alat” politik untuk memenuhi sebuah ketentuan. Maka bagi parpol, perekrutan caleg perempuan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif saja agar parpol tersebut lolos menjadi kontestan pemilu legislatif, tetapi harus dilakukan dengan benar sehingga perempuan yang duduk di parlemen bukan karbitan. Karena sebenarnya minat serta partisipasi perempuan dalam wadah di legislatif, merupakan akses untuk menunjukkan kemampuannya di bidang politik.

Sehingga mestinya hak-hak perempuan dalam politik juga harus terpenuhi. Jangan sampai kapasitas perempuan dalam parpol hanya memenuhi kuota. Parpol harus merekrut dan memilih kader perempuan yang berkualitas. Parpol harus memajukan kadernya agar cerdas karena akan maju untuk mewakili rakyat. Sehingga masyarakat juga harus memilih anggota dewan yang berkualitas. Maka disanalah proses demokrasinya.

Walau pun disadari bahwa di dunia politik terletak kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dipertaruhkan, namun begitu apabila kesempatan untuk terjun di dunia politik datang, para perempuan harus tidak ragu-ragu meraih kesempatan itu dan membuktikannya bahwa dia mampu dan bisa bekerja secara professional dan mengambil keputusan yang sama seperti laki-laki.²³

²²Titien Agustina, *Perjalanan Perempuan Indonesia dalam “Mengejar” Kuota Kursi Parlemen*, STIMI Banjarmasin, h.3.

²³Titien Agustina, *Perjalanan Perempuan Indonesia dalam “Mengejar” Kuota Kursi Parlemen*, STIMI Banjarmasin, h.13. jurnal.iain-antasari.ac.id (Diakses 20 Oktober 2016).

Secara umum, Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. keterwakilan politik perempuan tersebut terkait dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Konstruksi sosial, yang mana Perempuan sendiri terkonstruksi secara sosial, bahwa kedudukan-kedudukan tertentu yang sifatnya politis adalah laki-laki. Ini bersumber pada pertentangan antara dunia politik dengan dunia perempuan. Di samping itu, keterbatasan kemampuan perempuan, kegiatan masyarakat yang seolah-olah sebagai sesuatu tidak ideal untuk berpolitik, kesediaan perempuan sendiri untuk duduk di jajaran elit politik, memberikan sumbangan pada langgengnya konstruksi sosial tersebut.
2. Konteks sosial di Indonesia yang masih didominasi laki-laki yang mengedepankan KKN, kekerasan dan perebutan kekuasaan. Akibatnya adalah hancurnya sistem perekonomian dan sosial, ketidakpastian hukum, krisis kepercayaan di antara warga masyarakat dan Negara sehingga muncul berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia. Dalam situasi ini hampir tidak ada perempuan yang dilibatkan dalam peran penting pengambilan keputusan.
3. Konteks politik, yang mana produk politik dan perundang-undangan yang dihasilkan sangat tidak memihak kepentingan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan minimnya jumlah perempuan di lembaga-lembaga formal.

4. Sangat dibutuhkan Tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu.

Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.²⁴

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik.

Hambatan struktural dan kultural membutuhkan kaderisasi perempuan yang berstandar pada upaya transformatif politik dan menyambungkan spirit gerakan perempuan dalam pengorganisasian partai.

²⁴A. Oriza Rania Putri, *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*, 2013, h. 32. repository.unhas.ac.id (Diakses 10 Oktober 2016).

Model kaderisasi parpol pada umumnya menitikberatkan pada penguatan parpol bukan pada perempuan. Tidak ada transformasi politik dan tidak ada kesinambungan. Disamping itu juga tidak ada kontribusi bagi kesinambungan perempuan partai, media massa, semakin menyurutkan eksistensi perempuan.²⁵

Setelah pemilu 2004 lalu, muncul wacana tentang kuota perempuan 30 persen. Sampai pada akhirnya UU pemilu telah menetapkan kuota 30 persen perempuan harus dilakukan pada pemilu 2009. Namun apa yang terjadi, hampir semua partai politik tidak siap dengan para kader dan calon yang disiapkan untuk mengisi kuota ini. Akibatnya yang terjadi “saling comot” orang keluarga sendiri, putrinya, artis perempuan dan sosok-sosok lainnya yang muncul menjadi “kader dadakan”. Jika ini yang terjadi, maka kualitas “suara perempuan” (*the woman's voice*) agaknya masih dipertanyakan. Sejak pemilu 2004, dukungan untuk mengisi 30 persen kuota perempuan diparlemen diundangkan. Maka porsi kursi perempuan di parlemen diharapkan menjadi lebih banyak. Perkembangannya, rata-rata kuota ini terpenuhi tidak hanya di pusat tetapi di daerah-daerah juga. Namun, kemampuan komunikasi politik yang dimiliki oleh perempuan yang menjadi anggota parlemen masih jauh dari yang diharapkan. Kekuatan lobi-lobi perempuan di parlemen masih jauh kalah dari kekuatan dan dominasi laki-laki dalam berbagai forum pengambilan keputusan di lembaga parlemen ini.²⁶

²⁵A. Oriza Rania Putri, *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*, 2013, h. 31. repository.unhas.ac.id (Diakses 10 Oktober 2016).

²⁶Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, h. 183.

Sering kali perempuan yang akan menjadi calon legislatif tidak mempunyai kemampuan komunikasi politik yang andal. Terkesan malu-malu dan tidak dapat meyakinkan publik pemilihnya bahwa ia layak untuk dipilih. Potensi perempuan sebagai komunikator publik perlu digarap. Dalam banyak kasus, perempuan sendiri tidak hanya tidak mampu mengomunikasikan identitas dirinya sebagai perempuan tetapi juga mengomunikasikan agenda-agenda dan visi politiknya.

Pesan perempuan (*women's messages*) dan perempuan adalah pesan (*women Amerika Serikat message*) perlu untuk diperjelas dan dipahami oleh perempuan. Sering kali meskipun perempuan mempunyai ruang dan posisi yang menguntungkan di parlemen, baik sebagai ketua fraksi atau ketua DPRD sendiri, perempuan belum mampu memperjuangkan suara perempuan, kebutuhan perempuan dan proporsi pembagian persoalan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. Ketika perempuan mempunyai andil untuk bicara, perjuangan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas yang lain, belum mampu secara maksimal di kedepankan, dibandingkan persoalan atau masalah yang dihadapi umum yang lebih memihak kepentingan dominan laki-laki.²⁷

Charles F. Andrain menemukan, kesuksesan seorang yang pentas di gelanggang politik dalam berbagai konteks (lokal, nasional, maupun internasional) ditentukan berbagai faktor. Antara lain, keunggulan fisik, ekonomi, normatif, personal, and keahlian. Dengan memiliki lima modal dasar ini, seorang yang terjun ke dunia politik dipastikan sukses.²⁸

²⁷Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, h.186.

²⁸Hery Susanto dkk, *Menggapai Demokrasi* (Jakarta: Republika, 2005), h.127.

Fungsi partai politik tidak bisa dinafikan begitu saja, sebab partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik yang menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu. Sekurang-kurangnya terdapat empat fungsi partai politik, yakni: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik sebagai sarana komunikasi berfungsi untuk menyalurkan beragam pendapat dan masukan masyarakat sehingga dapat mengurangi kesimpangsiuran pendapat publik. Sebagai sarana sosialisasi politik, Partai politik merupakan wadah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik masyarakat. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik adalah wadah untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota parpol. Sedangkan partai politik sebagai sarana pengatur konflik, dimaksudkan bahwa dalam demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat merupakan soal yang wajar, sehingga jika terjadi konflik maka partai politik akan berusaha untuk mengatasinya.²⁹

Partai politik mempunyai kewajiban merekrut kader dan pemimpin yang berkualitas dan berwawasan. Partai politik sebagai suatu organisasi memainkan peran dalam menanamkan ideologi partai, kesetiaan moral kepada rakyat, *performance* sebagai kader politik, dan kemampuan sebagai *public speaker*.

Merujuk partai modern dan berkualitas/bermutu, maka dalam rekrutmen kader selalu memperhatikan sistem seleksi dan kaderisasi yang berjenjang dan terstruktur. Para kader yang melalui sistem seleksi ketat tentu akan menghasilkan kader

²⁹Hery Susanto dkk, *Menggapai Demokrasi*, h.130.

legistratur atau pemimpin yang andal dan *spartan*. Mengapa sistem kader yang ketat, karena tujuannya tidak hanya mencetak kader politisi untuk mengisi jabatan politiktapi jauh lebih penting mencetak kader secara kuantitas dan kualitas. Intinya, rekrutmen adalah mencetak kader yang berkualitas.³⁰

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.³¹

DPRD merupakan lembaga yang oleh Undang-Undang memiliki fungsi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota. Realitas pelaksanaan fungsi tersebut kadangkala tidak maksimal dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroiti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan.³²

tugas dan wewenang DPRD provinsi adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Menetapkan APBD bersama dengan gubernur.

³⁰ Hasrullah, *Opinium Politik dan Dramaturgi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 118.

³¹ Lihat UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

³² Jimly asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.149

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. Memilih gubernur.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samadengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yangmembebani masyarakat dan Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD provinsi memiliki hak yang sama dengan DPR, baik selaku lembaga maupun perseorangan anggota. Hak selaku lembaga tersebut adalah Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Sementara itu, selaku perseorangan, setiap anggota DPRD Provinsi memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah (perda), hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan/administratif.

Selain hak, kewajiban anggota DPRD Provinsi adalah sama dengan kewajiban anggota DPRD. Hanya saja, lingkup penerapannya ada di Provinsi. Keputusan

peresmian jabatan seorang anggota DPRD Provinsi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

DPRD Kabupaten/ Kota, peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Jumlah anggota DPRD kabupaten/Kota sekurang-kurangnya adalah 20 dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.

Untuk hak, kewajiban, dan kewenangan lainnya adalah mirip dengan DPRD Provinsi. Hanya saja, diterapkan di lingkup Kabupaten/kota dengan mitra kerjanya, yaitu Bupati/Walikota.

Adapun Wewenang dan tugas DPRD Kabupaten dan Kota yaitu :

1. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³³



³³ Lihat UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai jenis penelitian sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau disebut juga dengan penelitian normatif yuridis, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian *field research* kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah)¹. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.²

¹Lexii J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995), h. 15.

²Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Untuk menentukan lokasi penelitian maka ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Penelitian dilakukan di DPRD Kota Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pada dasarnya metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Creswell menyebutkan bahwa penelitian yang di bimbing dengan metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang diselenggarakan untuk memahami permasalahan manusia atau permasalahan sosial, dengan cara menciptakan gambaran yang menyeluruh serta kompleks melalui laporan berupa kata-kata, pandangan yang detail dari sumber informasi dan latar belakang yang alamiah³.

Berdasarkan paparan tentang penelitian kualitatif di atas, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

³Lexii J. Maleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 3.

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah cara pandang atau paradigma mempelajari tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

2. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁴

C. Sumber Data

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi. Adapun orang-orang yang ditemui untuk memberikan data seputar penelitian penulis adalah Indira Mulyasari Pramastuti Ilham, Melani Mustari Hj. Fatma Wahyuddin, Hj Haslinda dan Yeni Rahman.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah atau karya tulis lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

⁴<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (9 Juni 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian normatif dan penelitian yuridis:

1. Observasi

Pada penelitian ini, salah satu teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan adalah teknik observasi. Jika didefinisikan, observasi dapat dipahami sebagai suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Pada dasarnya penggunaan teknik observasi ini digunakan pada penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan ketika responden yang diamati pada lingkup yang tidak terlalu luas.⁵ Maka, untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan/observasi pada Anggota DPRD Wanita Kota Makassar guna untuk Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Secara konsep, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi yang dimaksud adalah dalam bentuk dialog, yang bersifat tanya jawab. Pada interaksi dan komunikasi ini, terlibat dua faktor yaitu pewawancara dan narasumber atau responden. Pewawancara merupakan pihak yang bertanya sedangkan narasumber atau responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak yang bertanya atau pewawancara. Pada konteks ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan mewawancarai beberapa pihak yakni pihak dari anggota DPRD Perempuan kota

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145.

Makassar yaitu Indira Mulyasari Pramastuti Ilham, Melani Mustari Hj. Fatma Wahyuddin, Hj Haslinda dan Yeni Rahman. Pada teknisnya, peneliti menggunakan tehnik wawancara langsung atau wawancara secara *face to face* serta jenis wawancara semistructur interview yang menanyakan opini, pandangan serta tanggapan pihak-pihak tersebut terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar

3. Dokumentasi

Pada dasarnya dua teknik pengumpulan data sebelumnya dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari objek yang diteliti (data primer). Dari penelitian ini peneliti juga memperoleh data yang tidak langsung berasal dari objek penelitian yang diteliti. Dengan kata lain bahwa peneliti juga menghimpun data dari dokumen-doumen yang bersangkutan serta data dari akses situs internet maupun beberapa literatur.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga peloparan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, maka dari itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: daftar pertanyaan penelitian, camera, alat perekam, pulpen dan buku tulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan, mengusahakan supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses, cara, perbuatan mengolah.

Data berarti keterangan yang benar dan nyata dan atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Jadi, pengolahan data ialah proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana.

2. Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dapat dipahami. Susan Stainback juga memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan analisis data. Ia mengemukakan bahwa analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif, yang mana hal itu digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dari data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dikembangkan dan

dievaluasi.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu tahapan pada penelitian yang didalamnya terdapat sebuah proses, yang mana proses itu berupa pengorganisasian data, penjabaran data, penafsiran data serta penyimpulan data yang telah ditafsirkan sebelumnya.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data model Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷

a) *Data reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap awal ini, peneliti berupaya untuk merangkum data-data yang telah peneliti dapatkan ketika melakukan observasi, wawancara serta data dari sumber dokumen lain. Atau dengan kata lain pada tahap ini peneliti memilih data-data yang pokok atau relevan dengan kebutuhan penelitian.

b) *Data display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data pokok yang telah dirangkum sebelumnya ke dalam bentuk bagan dan penjelasan data dalam bentuk teks. Peneliti memberikan pemaparan tentang data-data yang ditemui dan telah difilter pada tahap sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa penafsiran atau penerjemahan data, agar kemudian dapat dipahami.

c) *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap akhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan penafsiran data pada tahap sebelumnya.

⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), h. 244.

⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 246.

BAB IV

PERAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MAKASSAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Makassar

Kota Makassar secara geografis berbatasan langsung dengan dan berada dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar dikenal sebagai kota Maritim, Niaga dan Pendidikan, inilah yang menjadikan Makassar dikenal.

Kota Makassar terbentuk pada tanggal 9 November 1607. Kemudian berubah menjadi Kota Madya pada tahun 1906, selanjutnya Makassar mengalami pergantian nama menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971. Namun diubah kembali menjadi Kota Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999. Selama kurun waktu 1927 – 2017, penyelenggaraan Pemerintah Kota Makassar telah mengalami 19 kali pergantian kepemimpinan, yaitu :

- a. J.E. Damrik
- b. Mr. Gunta Yamazaki
- c. Abd. Hamid Dg. Manggasing
- d. I. M. Qaemuddin
- e. Sampara Dg. Lili
- f. H. M. Yunus Dg. Mile
- g. Abdul Latief Dg. Massikki
- h. Ahmad Dara Syacharuddin

- i. H. Aroepala
- j. H. Muh. Dg Patompo
- k. Abustan
- l. H. Jancy Raib
- m. Suwahto
- n. H. A. Malik B. Masry
- o. H. B. Amiruddin Maula
- p. Ilham Arief Sirajuddin
- q. H. A. Herry Iskandar
- r. Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto

2. Sejarah singkat DPRD Kota Makassar

Awalnya jumlah anggota DPRD kota Madya tingkai II Ujung Pandang yang ditetapkan adalah berjumlah 40 orang. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1971, adapun susunan anggota DPRD Kota Madya Tingkai II Ujung Pandang Masa Bhakti 1971-1977 yaitu :

1. Partai Katholik	1 Orang
2. Partai Syarikat Indonesia	2 Orang
3. Partai Nadhlatul Ulama	7 Orang
4. Partai Muslimin Indonesia	3 Orang
5. Golongan Karya	17 Orang
6. Partai Kristen	1 Orang
7. Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam	1 Orang
8. Utusan Golongan ABRI	8 Orang

Selama kurun waktu 1959 – 2017 puuk pimpinan DPRD Kota Makassar telah mengalami 10 (sepuluh) kali pergantian, yakni :

1. H. M. Akib Ismail (1959 – 1970)
2. Drs. H. Balasong (1971 – 1977)
3. H. Hody (1977 – 1982)
4. Drs. H. M. Arsyad Abu (1982 – 1992)
5. H. M. YahyaPatu (1992 – 1997)
6. Drs. Burhanuddin Ali (1997 – 1999)
7. P. N. RIVAI (1999 – 2004)
8. Ir. Markus Nari, M.Si (2004)
9. Drs. H. I. Adnan Mahmud (2004 – 2012)
10. Ir. Farouk M. Betta, MM (2012 – Sekarang)

3. Visi dan Misi DPRD Kota Makassar

a. Visi DPRD Kota Makassar

Rumusan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 – 2014 yaitu mewujudkan Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar yaitu :

- 1) Jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan dalam pergaulan Regional, Nasional dan Global.
- 2) Jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan

untuk menerima pembaharuan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai – nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka Visi DPRD Kota Makassar adalah Mendukung terwujudnya Makassar menuju Kota Dunia yang berlandaskan Kearifan Lokal secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan serta penanganan Aspirasi Masyarakat.

b. Misi DPRD Kota Makassar

- 1) Meningkatkan kemampuan anggota sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.
- 2) Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar alat – alat kelengkapan DPRD agar sinergis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan kajian, penelaahan, pembahasan dan penyusunan Perda yang didasarkan atas Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan kondisi serta tuntutan masyarakat.
- 4) Melaksanakan pembahasan APBD yang patut, wajar, dan Rasional serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan harapan masyarakat.
- 5) Melaksanakan pertanggung jawaban publik seara moral dan politik atas tugas dan kewajiban yang telah diusulkan secara berkala dan transparan.

Saat ini anggota DPRD Kota Makassar periode 2014 – 2019 berjumlah 50 orang yang terdiri dari :

1. Partai Golongan Karya	8 Orang
2. Partai Demokrat	7 Orang
3. Partai Gerakan Indonesia Raya	5 Orang
4. Partai NasDem	5 Orang
5. Partai Persatuan Pembangunan	5 Orang
6. Partai Hati Nurani Rakyat	5 Orang
7. Partai Keadilan Sejahtera	5 Orang
8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4 Orang
9. Partai Amanat Nasional	4 Orang
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1 Orang
11. Partai Bulan Bintang	1 Orang

Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2057/X/Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar masa Jabatan tahun 2014 – 2019 tanggal 31 Oktober 2014 yaitu :



Ketua DPRD Kota Makassar
Partai Golongan Karya



ADI RASYID ALI, SE

Wakil Ketua I
Partai Demokrat



ERIC HORAS, SE

Wakil Ketua II
Partai Gerindra



INDIRA MULYASARI PARAMASTUTI ILHAM

Wakil Ketua III
Partai NasDem

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 9/PIMP/DPRD/IX/2014 tentang Pembentukan Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar Tanggal 22

Desember 2014 yaitu : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

N0.	Nama	Jabatan Dalam Fraksi
1.	Fraksi Partai Golongan Karya	
	1. Ir. FaroukM. Betta, MM.	Penasehat
	2. Drs. H. Andi Hasir HS, MI.Kom.	Ketua
	3. Rahman Pina, SIP.	Wakil Ketua
	4. H. ABD. Wahab Tahir, SH.	Sekretaris
	5. H. Samsuddin Kadir, SE.	Wakil Sekretaris
	6. Ir. Andi Nurman, M.Si.	Bendahara

	7. H. Saharuddin Said, SE. 8. Melani Mustari, SE.	Wakil Bendahara JURU Bicara
II.	Fraksi Partai Demokrat 1. Adi Rasyid Ali, SE. 2. Abdi Asmara, SH. 3. H. Agung Wirawan, S.Sos. 4. H. Arifin Dg Kulle, SE. 5. Basdir, SE. 6. H. Syarifuddin Badollahi, SE. 7. Dr. H. Muh. Said, MM. 8. Hj. Fatma Wahyudin, St, MM. 9. Susuman Halim.	Penasehat Ketua Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 Sekretaris Wakil Sekretaris 1 W. Sekretaris 2 Bendahara Wakil Bendahara
III.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1. Drs. Amar Busthanul 2. Eric Horas, SE. 3. Andi Pahlevi, SE. 4. Lisdayanti Sabri 5. Ir. Mustafa Alwi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
IV.	Fraksi Partai Nasional Demokrat 1. Mario David Pn, S.Sos.	Ketua

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rudianto Lallo, SH. 3. H. Irwan Djafar. 4. Indira Mulyasari Pramastuti Ilham. 5. Supratman. 	<p>Sekretaris</p> <p>Bendahara</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
V.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Busranudin Bt, SE. 2. Fasruddin Rusli, SE. 3. Abdul Wahid, S.Sos. 4. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE, M.Si. 5. H. Sampara Sarip, SH. 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p> <p>Bendahara</p>
VI.	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Muh. Yunus Hj, M.Si. 2. Mustagfir Sabry, S.Ag., M.Si. 3. Shinta Mashita Molina, A.Md. 4. H. Jufri, S. Sos. 5. Abdul Kadir, SE. 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
VII.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera <ol style="list-style-type: none"> 1. Irwan, ST. 2. H. Muhamma Iqbal, Lc. 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p>

	3. Yeni Rahman, S.Si. 4. Hj. Haslinda, S.Sos., M.Si. 5. Mudzakkir Ali Djamil, ST.	Sekretaris Bendahara Anggota
VIII.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1. Andi Vivin Sukmasari, SE, ST. 2. Mesakh Raymond Rantepadang, SH. 3. William. 4. H. Munir Mankana, SH.	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
IX.	Fraksi Partai Amanat Nasional 1. H. Zaenal Dg. Beta, S.Sos., M.Si. 2. H. Sangkala Saddiko, SH. 3. Hamzah Hamid, S.Sos., Mm. 4. H. Hazanuddin Leo, Se, M.Si.Ak.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perempuan Terlibat dalam Pembentukan PERDA

Keterlibatan Perempuan dalam berbagai jabatan publik tidak terlepas dari adanya kesetaraan dan Keadilan Gender. Kesetaraan Gender bukanlah diartikan bahwa seorang perempuan sama dengan seorang Laki-Laki, dimana perempuan boleh mengerjakan pekerjaan laki-laki atau bertukar posisi sekaligus. Pada dasarnya

kesetaraan Gender mengandung makna bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki diharapkan dapat memperoleh hak asasinya dalam hal akses, Peluang, Benefit dan Kontrol terhadap sumber daya dan berbagai aspek kehidupan.

Atas dasar kesetaraan Gender sehingga Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk menduduki jabatan publik. Jabatan publik salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD. Jauh Sebelum adanya kesetaraan dan Keadilan Gender Perempuan dahulu hanya memiliki 3 tugas utama yakni di Dapur, di Sumur dan di Kasur, namun dengan hadirnya kesetaraan dan keadilan Gender maka Perempuan sudah bisa ikut berpartisipasi sebagai anggota DPRD yang salah satu Tugas dan Fungsinya adalah Membentuk Peraturan Daerah Selanjutnya disebut PERDA.

Namun sebelum sampai sebagai anggota DPRD yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah membentuk PERDA, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Adapun yang menjadi syarat menjadi calon legislatif berdasarkan UU No 8 tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis, dalam bahasa Indonesia.

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

14. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Keterlibatan Perempuan sebagai anggota DPRD didasari dengan beberapa faktor sebagai berikut :

a. Faktor Yuridis.

Salah satu yang menjadi faktor seorang perempuan menjabat sebagai anggota DPRD adalah faktor Yuridis. Sebagai Negara Hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tentunya segala aktifitas dan Rutinitas warga negara dalam Negara Republik Indonesia harus memiliki landasan Yuridis.

Dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan adanya pasal dalam konstitusi yang menjamin kesamaan kedudukan dalam

pemerintahan dan hukum sebagai bagian dari hak asasi dan sebagai bentuk dari manifestasi asas *Equality Before The Law* maka sudah jelas bahwa baik laki-laki an perempuan adalah subjek hukum yang harus diperlakukan sama tanpa ada perbedaan yang berakibat timbulnya Diskriminasi.

Selain itu, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini semakin memperkuat kedudukan seorang perempuan untuk memperoleh jabatan sebagai anggota DPRD.

Aturan diatas menjadi dasar hadirnya Undang-Undang yang lebih Spesifik mengatur tentang keikutsertaan Perempuan dalam politik. Dalam pasal 15 UU No.8 tahun 2012, dikatakan bahwa Parpol peserta pemilu punya kewajiban memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan pasal 55 UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD punya kewajiban memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.¹

Menurut Haslinda bahwa ketika seseorang telah dilantik sebagai anggota DPRD baik dia perempuan ataupun laki-laki maka semuanya berhak dan memiliki wewenang untuk terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah karena itu telah menjadi tugas an wewenang seorang anggota DPRD yang diatur Dalam Undang-Undang.²

¹ UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

² Wawancara dengan Haslinda anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, 8 Agustus 2017 .

Selain Haslinda, Yeni Rahman mengatakan bahwa keterlibatan Perempuan dalam jabatan Politik yakni DPRD juga sangat penting, selain Manifestasi dari Peraturan PerUndang-Undangan yang mengharuskan keterwakilan perempuan 30 % di DPRD juga sebagai bentuk untuk mewakili dan membawa aspirasi para Perempuan.³

b. Faktor Sosiologis.

Faktor sosiologis berkaitan erat dengan keberadaan dan kebiasaan masyarakat atau adat istiadat masyarakat Makassar yang diklaim sebagai kota Sombere' and Smart City. Keterlibatan perempuan dari segi sosiologis dipandang sebagai salah satu langkah untuk mewakili segala kebutuhan-kebutuhan perempuan untuk disuarakan di DPRD Kota Makassar.

Menurut Melani Mustari "Sekarang ini adalah zaman emansipasi perempuan, dan pertimbangan dari seorang perempuan sangat diperlukan, memang laki-laki punya pemikiran yang hebat tetapi perempuan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik oleh karena itulah keberadaan perempuan sangat diperlukan di DPRD Kota Makassar."⁴

Menurut Yeni Rahman keberadaan perempuan sangat penting di DPRD Kota Makassar, karena kadang-kadang ada kepentingan perempuan yang harus

³ Wawancara dengan Yeni Rahman anggota DPRD Kota Makassar, 8 Agustus 2017 .

⁴ Wawancara dengan Melani Mustari anggota DPRD Kota Makassar, 14 Agustus 2017 pukul .

diperjuangkan oleh anggota DPRD Perempuan karena masalah perempuan maka perempuan pulalah yang mengerti.⁵

Selain Yeni Rahman, Hj. FatmaWahyudin juga mengatakan bahwa semua kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan dan anak maka disitulah fungsi anggota DPRD perempuan agar kepentingan-kepentingan mereka tidak terlupakan Oleh Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan di DPRD Kota Makassar.⁶

c. Faktor Filosofis

Filosofis berarti cinta akan kebijaksanaan. Ketika berbicara masalah filosofis maka yang akan menjadi persoalan adalah sisi keadilan dari segala sesuatu.

Terkait dengan keberadaan perempuan sebagai anggota DPRD secara filosofis adalah bentuk keadilan dari segi keterwakilan. Laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda dengan perempuan, begitupun dengan perempuan yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda pula dengan laki-laki, sehingga kehadiran perempuan di DPRD Kota Makassar tentunya sangat berguna dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang sebagiannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Menurut Hj. FatmaWahyudin pembentukan PERDA merupakan momen untuk menyuarakan berbagai aspirasi dan kepentingan perempuan, disitulah peran

⁵ Wawancara dengan Yeni Rahman anggota DPRD Kota Makassar, 8 Agustus 2017 pukul .

⁶ Wawancara dengan Hj. Fatma Wahyudin anggota DPRD Kota Makassar, 18 Agustus 2017 .

perempuan di DPRD bersuara untuk kesejahteraan perempuan yang ada di kota Makassar.⁷

C. Peran Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di DPRD Kota Makassar.

Keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan di negara kita merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan sistem perwakilan. Meski di Negara Indonesia keterlibatan perempuan baik dalam partai politik ataupun jabatan seperti DPR dan DPRD hanya memiliki kuota 30 % namun langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat dan bakat keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan.

Keikutsertaan Perempuan dalam proses perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai alasan, mulai dari adanya alasan sosiologis bahwa untuk urusan perempuan maka perempuan pulalah yang ahli dalam hal tersebut hingga pada alasan yuridis bahwa konstitusi menghendaki adanya persamaan dihadapan hukum dan dalam pemerintahan, hal inilah salah satu pemicu hadirnya UU PEMILU yakni UU No.8 tahun 2012 yang mengharuskan adanya keterwakilan Perempuan 30 % di DPR dan DPRD.

Keterlibatan Perempuan sebagai anggota DPRD secara otomatis akan memberikan kewenangan untuk turut serta dalam pembentukan Peraturan Daerah. Begitupun di DPRD Kota Makassar, Hadirnya beberapa perempuan yang menjabat

⁷ Wawancara dengan Hj. Fatma Wahyudin anggota DPRD Kota Makassar, t 18 Agustus 2017

sebagai anggota DPRD Perempuan Kota Makassar diharapkan mampu betul-betul memperjuangkan aspirasi perempuan.

Berikut Daftar Anggota Perempuan di DPRD Kota Makassar :

No	Nama	Fraksi
1.	Indira Mulyasari Pramastuti Ilham	Partai Nasdem
2.	Melani Mustari	Partai Golkar
3.	Hj. Fatma Wahyuddin	Partai Demokrat
4.	Lisdayanti Sabri	Partai Gerindra
5.	Hj. HASLINDA	P K S
6.	Yeni Rahman	P K S
7.	Andi Vivin Sukmasari	P D I P
8.	Shinta Mashita Molina	Partai Hanura ⁸

Dari data diatas, setidaknya ada 8 Perempuan yang mewakili kaum perempuan di DPRD Kota Makassar yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan. Namun menurut Yeni Rahman bahwa Kuota Perempuan di DPRD Kota Makassar belumlah memenuhi 30 %, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah anggota DPRD Kota Makassar adalah 50 orang, maka seharusnya untuk mencapai angka 30 % maka seharusnya ada sekitaran 15 Perempuan yang duduk

⁸ Sumber : DPRD Kota Makassar

sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena Perempuan kurang tertarik untuk turut serta dalam proses politik.⁹

Kurangnya ketertarikan perempuan untuk turut serta dalam proses perpolitikan menjadi perhatian tersendiri untuk pemerintah agar kiranya dapat meningkatkan minat kaum perempuan dalam proses politik, begitu juga dengan partai politik agar membuka ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk turut serta dalam proses politik sebagai amanah dari Undang-Undang.

Menurut Indira Mulyasari Pramastuti “ Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan hanya sebagian kecil, dari 50 anggota DPRD Kota Makassar hanya ada 8 Perempuan. Berarti tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat Partisipasi kaum perempuan di Dunia Politik memang belum terlalu besar, tetapi karena periode 2014-2019 sudah berjalan maka yang terpenting adalah bagaimana Partai menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang strategis dalam pengambilan suatu keputusan. Lebih lanjut Indira menjelaskan bahwa salah satu peran Perempuan dalam pembentukan PERDA di DPRD Kota Makassar yaitu salah seorang Perempuan menjadi Wakil Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan daerah”¹⁰

Sementara menurut Hj Fatma Wahyuddin bahwa salah satu keterlibatan Perempuan dalam Pembentukan PerDa adalah dengan mengupayakan agar setiap Panitia Khusus selanjutnya disebut PanSus yang dibentuk untuk membentuk Peraturan daerah agar memiliki wakil seorang perempuan, karena jangan sampai ada

⁹ Wawancara dengan Yeni Rahman anggota DPRD Kota Makassar, 8 Agustus 2017 pukul 11.43 Wita.

¹⁰ Wawancara dengan Indira Mulyasari Pramastuti anggota DPRD Kota Makassar, 18 Agustus 2017 pukul 11.20 Wita.

pansus yang tidak mengikutsertakan Perempuan dalam pansus tersebut. Padahal disitulah hak perempuan dalam memperjuangkan berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan kaum perempuan. Dan salah satu bentuk peran perempuan dalam Pembentukan PerDa adalah menjadi Ketua PanSus pembentukan PerDa tentang ASI (Air Susu Ibu).¹¹ Perda Asi mengatur tentang hak seorang anak dalam area publik. PerDa ini mengatur kewajiban penyediaan ruang laktasi untuk ibu menyusui di seluruh kantor, tempat kerja, penyelenggara kesehatan dan sarana umum wajib.

Menurut Melani Mustari, bahwa dalam pembentukan PerDa biasanya Fraksi melihat Peruntukan PerDa tersebut, apabila PerDa diperuntukkan bagi kaum perempuan maka biasanya Fraksi mengutus lebih banyak Perempuan seperti pada pembentukan PerDa tentang ASI. Tetapi ketika PerDanya diperuntukkan umum biasanya Fraksi lebih banyak mengirim Laki-laki. Jadi segalanya tergantung dari fraksi siapa yang ditunjuk untuk masuk dalam peranangan PerDa tersebut memperjuangkan aspirasi masyarakat.¹²

Adapun Proses Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Berikut :

1. Proses Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

Sebagaimana halnya DPR, dalam konteks Daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul

¹¹ Wawancara dengan Hj. Fatma Wahyudin anggota DPRD Kota Makassar 18 Agustus 2017 .

¹² Wawancara dengan Melani Mustari anggota DPRD Kota Makassar, 14 Agustus 2017 pukul .

Rancangan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaannya RAPERDA dari lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas pembahasan lebih lanjut di tingkat eksekutif. Setelah itu maka akan dibentuk tim asistensi dengan Sekretaris yang berada di Biro/ Bagian Hukum.

2. Proses Penyiapan RAPERDA di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pada proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah diawali adanya prakarsa dari Pimpinan Unit Kerja untuk mengusulkan suatu produk hukum daerah (Raperda). Rencana Penyusunan RAPERDA ini diajukan oleh pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Yang dimaksud dengan Pimpinan Unit Kerja yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan sekretariat dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Beberapa hal yang mesti dilampirkan dalam usulan awal RAPERDA dari pimpinan Unit Kerja antara lain memuat isi pokok-pokok pikiran terdiri:

a. Maksud dan Tujuan Pengaturan

- b. Dasar Hukum
- c. Materi yang diatur; dan
- d. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat Daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan dalam RAPERDA tersebut, maka sekretaris Daerah akan mengambil keputusan . Sekretaris Daerah juga menugaskan kepala Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.

Apabila Sekretaris Daerah menyetujui, pimpinan Unit Kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan . Pembahasan ini harus melibatkan Biro/ Bagian Hukum, Unit Kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu Unit Kerja Dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah (raperda) terebut.

Rencana Peraturan Daerah yang sudah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

3. Proses Mendapatkan Persetujuan (Pembahasan di DPRD)

Raperda yang masuk ke Sekretariat DPRD baik atas usul inisiatif DPRD maupun atas inisiatif Pemerintah Daerah, selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/ Walikota . Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris berada di Biro/ Bagian Hukum.

Pada tahapan pembahasan di DPRD ini dilakukan beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.

Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD akan ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing Daerah. Khusus untuk RAPERDA atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau Pejabat Unit Kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4. Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu RAPERDA dalam rapat paripurna akhir di DPRD telah selesai dan RAPERDA tersebut telah disetujui oleh DPRD maka selanjutnya akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Penomoran Perda akan dilakukan oleh Biro/ Bagian Hukum dan Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentikasi. Selanjutnya Kepala Daerah akan mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dengan cara menandatangani Peraturan Daerah tersebut.

Setelah Perda tersebut disahkan oleh Kepala Daerah, agar perda tersebut dapat berlaku dan mengikat umum, kemudian Perda tersebut akan diundangkan oleh

Sekretaris Daerah. Setelah itu Biro/Bagian Hukum bertanggungjawab terhadap penggandaan, pendistribusian, dan pendokumentasian Perda Tersebut.

Dalam hal diketahui masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan RAPERDA yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah.

Jika masih terdapat kesalahan teknis penyusunan setelah RAPERDA disampaikan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan RAPERDA yang telah disetujui oleh DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Setelah Perda diundangkan, tetapi masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Setelah itu berdasarkan hukum yang berlaku, Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah itu dan pihak yang terkait mengetahuinya.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut daftar Perda yang telah diterbitkan oleh DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 :

PerDa yang dihasilkan tahun 2014

¹³legislasi.blogspot.co.id/2008/12/kuliah6-proses-pembentukan-peraturan.html?m=1, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 22.34 Wita

No	No Dan Tanggal Perda	Nama Perda	No/Tanggal Lembar Daerah	Keterangan
1.	1 Tahun 2014 13 Agustus 2014	Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2013	13 Agustus 2014	Pemerintah Kota Makassar
2.	2 Tahun 2014 5 September 2014	Perubahan APBD TA 2014	5 September 2014	Pemerintah Kota Makassar
3.	3 Tahun 2014 5 September 2014	Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	29 September 2014	Inisiatif DPRD Kota Makassar
4.	4 Tahun 2014 5 September 2014	Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol	8 Oktober 2014	Inisiatif DPRD Kota Makassar
5.	5 Tahun 2014 28 November 2014	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019	28 September 2014	Pemerintah Kota Makassar

6.	6 Tahun 2014 29 Desember 2014	APBD TA 2015	29 Desember 2014	Pemerintah Kota Makassar ¹⁴
----	-------------------------------------	--------------	---------------------	---

Dari data di atas, tahun 2014 menghasilkan 6 PerDa, 4 atas inisiatif dari Pemerintah Kota Makassar dan 2 Inisiatif dari DPRD Kota Makassar. Sedangkan daftar PerDa yang dihasilkan di tahun 2015 yaitu :

No	No Dan Tanggal Perda	Nama Perda	Keterangan
1.	1 Tahun 2015 21 Agustus 2015	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	Pemerintah Kota Makassar
2.	2 Tahun 2015 9 Septemer 2015	Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahang Bitowa, Kelurahang Laikang, Kelurahang Berua, Kelurahang Katimbang, Kelurahang Bakung, Kelurahan Buntusu,	Pemerintah Kota Makassar

¹⁴ Sumber : DPRD Kota Makassar

		Kelurahan Kapasa Raya Dalam Wilayah Kota Makassar	
3.	3 Tahun 2015 9 September 2015	Pembentukan Keamatan Kepulauan Sangkarrang dalam Wilayah Kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar
4.	4 Tahun 2015	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar tahun 2015-2035	Pemerintah Kota Makassar
5.	5 Tahun 2015 16 November 2015	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015	Pemerintah Kota Makassar
6.	6 Tahun 2015 29 Juli 2015	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pemerintah Kota Makassar
7.	7 Tahun 2015	APBD TA 2016	Pemerintah Kota Makassar

Dari data diatas, setidaknya dalam kurung waktu tahun 2015 setidaknya ada 7 Perda yang dihasilkan, namun semuanya atas inisiatif dari Pemerintah Kota Makassar. Sedangkan pada tahun 2016 PerDa yang dihasilkan sebagai berikut :

No	No Dan Tanggal Perda	Nama Perda	Keterangan
1.	1 Tahun 2016	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemerintah Kota Makassar
2.	2 Tahun 2016	Tanggungjawab dan Sosial Perusahaan (CSR)	Inisiatif DPRD Kota Makassar
3.	3 Tahun 2016	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Pemerintah Kota Makassar
4.	4 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	Pemerintah Kota Makassar
5.	5 Tahun 2016	Perubahan APBD TA 2016	Pemerintah Kota Makassar
6.	6 Tahun 2016	Penyertaan Modal Seara Non Kas Dari Pemerintah Kota Makassar ke PDAM Kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar
7.	7 Tahun 2016	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar	Pemerintah Kota Makassar
8.	8 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan	Pemerintah Kota

		Perangkat Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar	Makassar
9.	9 Tahun 2016	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Inisiatif DPRD Kota Makassar
10.	10 Tahun 2016	APBD TA 2017	Pemerintah Kota Makassar

Dari data diatas, setidaknya dalam kurun waktu 2016 telah dihasilkan sebanyak 10 PerDa, 8 diantaranya adalah inisiatif Pemerintah Kota Makassar dan 2 atas inisiatif DPRD Kota Makassar. Sedangkan pada tahun 2017 belum 1 pun PerDa yang berhasil diterbitkan oleh DPRD Kota Makassar.

ANALISIS PENULIS

Berdasarkan uraian-uraian, data dan fakta yang telah dikemukakan diatas maka penulis menganggap perlu an sangat penting untuk adanya keterwakilan kaum perempuan di DPRD Kota Makassar. Penulis sepakat bahwa untuk urusan perempuan maka perempuan sendirilah yang mengerti oleh karena itu keberadaan Perempuan di DPRD Kota Makassar sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak Perempuan demi kesejahteraan dan kemajuan kaum perempuan.

Namun keterwakilan kaum perempuan di DPRD Kota Makassar diharapkan mampu bekerja secara optimal dan benar-benar demi kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan partai. Perempuan yang dianggap memiliki pertimbangan yang lebih baik karena sifat alami sebagai seorang ibu diharapkan benar-benar mampu

termanifestasi dalam kinerjanya utamanya dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang akan berlaku untuk masyarakatnya.

Keberadaan Perempuan di DPRD bukan hanya sekedar untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi Murni agar pertimbangan-pertimbangan dari kaum perempuan juga teraplikatif dalam setiap kebijakan yang diambil oleh DPRD Kota Makassar. Perempuan di DPRD Kota Makassar diharapkan bukan hanya datang dan duduk diam mengisi absensi dan sekedar menyetujui kebijakan yang akan diambil oleh anggota DPRD Laki-Laki tetapi lebih dari itu, anggota DPRD Perempuan Kota Makassar diharapkan mampu menjadi pelopor munculnya ide-ide baru yang Pro Rakyat.

Namun, melihat data pembentukan Peraturan Daerah yang dihasilkan Oleh DPRD Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 hanya ada 4 Peraturan Daerah yang dibuat atas inisiatif DPRD Kota Makassar. Dari total 23 Peraturan Daerah yang berhasil diterbitkan selama tahun 2014 - 2016, hanya 4 inisiatif dari DPRD Kota Makassar, sehingga ini menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi seluruh anggota DPRD Kota Makassar tak terkecuali anggota kaum DPRD Perempuan, keberadaan mereka di DPRD Kota Makassar sepertinya sama sekali tak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penulis menganggap bahwa keberadaan Perempuan di DPRD Kota Makassar belumlah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, hal ini terbukti dengan sangat kurangnya Peraturan Daerah yang dihasilkan atas inisiatif DPRD Kota Makassar.

Seharusnya keberadaan Perempuan di DPRD Kota Makassar bisa lebih meningkatkan kinerja DPRD Kota Makassar, selain itu Perempuan yang ada di DPRD Kota Makassar juga harus menjadi panutan untuk seluruh kaum perempuan yang ada di Makassar agar ketertarikan kaum perempuan untuk turut serta dalam hal perpolitikan bisa ditingkatkan dan amanat Undang – Undang yang menghenaki keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar sebanyak 30 % dapat terpenuhi. Selain itu, apabila kaum perempuan yang ada di DPRD Kota Makassar dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik maka akan menimbulkan kepercayaan pula dari partai politik sehingga partai politik akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kaum perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Faktor faktor yang menyebabkan keikutsertaan Perempuan dalam proses politik bahkan setidaknya menduduki jabatan DPRD Kota Makassar didasarkan 3 hal yakni landasan Yuridis bahwa keikutsertaan perempuan dalam proses politik hingga menduduki jabatan DPRD berdasarkan UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan secara Sosiologis keberadaan perempuan di DPRD Kota Makassar merupakan salah satu bentuk Emansipasi perempuan , dan secara Filosofis bahwa keberadaan perempuan di DPRD Kota Makassar adalah bentuk keadilan dari segi perwakilan karena dengan keberadaan perempuan di DPRD maka aspirasi perempuan akan betul-betul di perjuangkan.
2. Bahwa Urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan perempuan hanya dimengerti oleh sesama perempuan, sehingga peran perempuan dalam membentuk Peraturan Daerah sangat *Urgent* agar kepentingan-kepentingan perempuan juga terserap dalam Perda tersebut. Salah satu peran anggota DPRD Perempuan dengan menjadi ketua PanSus Pembentukan Peraturan Daerah tentang Air Susu Ibu (ASI). Perda Asi mengatur tentang hak seorang anak dalam area publik. PerDa ini mengatur kewajiban penyediaan ruang laktasi untuk ibu menyusui di

seluruh kantor, tempat kerja, penyelenggara kesehatan dan sarana umum wajib. Ketua Pansus dalam Pembentukan PerDa ASI adalah Yeni Rahman.

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada seluruh Perempuan anggota DPRD Kota Makassar agar lebih meningkatkan lagi Progresifitasnya dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Perempuan di DPRD Kota Makassar diharapkan mampu mengimbangi anggota DPRD Laki-Laki bahkan diharapkan mampu menciptakan ide-ide baru yang belum pernah dilaksanakan oleh anggota DPRD Laki-Laki selama ini, serta anggota DPRD Perempuan di Kota Makassar juga diharapkan betul-betul memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan perempuan bukan hanya menikmati jabatan saja.
2. Kepada seluruh perempuan di Kota Makassar agar lebih meningkatkan kemampuan dirinya dan menunjukkan bakat dan minatnya di bidang Politik, serta berani bertarung sebagai anggota DPRD Kota Makassar untuk melakukan sebuah perubahan yang jauh lebih baik.
3. Kepada anggota laki-laki DPRD kota makassar agar kiranya tidak pernah memandang sebelah mata ide-ide dan masukan-masukan anggota DPRD Perempuan yang ada di Kota Makassar, keduanya diharapkan mampu bekerjasama untuk mewujudkan DPRD Kota Makassar yang lebih Progresif lagi.
4. Kepada Fraksi Partai Politik agar lebih sering memberikan kesempatan kepada perempuan atau menempatkan perempuan pada jabatan Strategis, berikan kepercayaan bahwa Perempuan juga Bisa melakukan perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina Titien, *Perjalanan Perempuan Indonesia dalam “Mengejar” Kuota Kursi Parlemen*, STIMI Banjarmasin, h. 5. jurnal.iain-antasari.ac.id. Diakses 20 Oktober 2016.

asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Budiardjo Miriam . *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Daulay Harmona. *Perempuan Dalam Kelut Gender* Medan : USU Press, 2007.

Gaffar Afan, *Menampung partisipasi Politik Rakyat, JSP*, Gadjah Mada University press, 1997 Volume 1, Nomor 1

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Hasrullah, *Opinium Politik dan Dramaturgi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hery Susanto dkk, *Menggapai Demokrasi*, Jakarta: Republika, 2005.

[Http://Artikelpengertianmakalah.Blogspot.Co.Id/2015/05/Pengertian-Dprd-Tugas-Wewenang-Hak-Dan-Dan.Html/](http://Artikelpengertianmakalah.Blogspot.Co.Id/2015/05/Pengertian-Dprd-Tugas-Wewenang-Hak-Dan-Dan.Html/) Diakses Pada Pukul 20.00 (18 Oktober 2016).

<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada pukul 12.40 WITA Tanggal 10 Maret 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2012.

Makalah direktur perancangan peraturan perundang-undangan ditjen peraturan perundang undangan Departemen Hukum dan HAM Suharyono, pengaturan tentang penyusunan dan pengelolaan prolegda, disampaikan pada temu konsultasi panitia Legislasi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Hukum dan HAM, mean 27-29 maret 2007.

Mas'oed Mohtar dan Dr. Colin MacAndrews. Ed. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015

Muslim, *Kitab Al Birr Wash Shilah Wal Adab, Bab Tahrim Dzulmin Muslim*, No.2564.

Putri A Oriza Rania, *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*, 2013, h. 32.repository.unhas.ac.id. (Diakses 10 Oktober 2016).

Qomar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Riwanto Agus, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)

Ruslin Ismah Tita, *Pemikiran Politik Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Subiakto Henry dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012)

legislasi.blogspot.co.id/2008/12/kuliah6-proses-pembentukan-peraturan.html?m=1, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 22.34 Wita

UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

UU No 2 Tahun 2011 pengganti UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Garamedia, 1985.

UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E No. 1-2 Telp. 868296 - 840022 - 880863 Fax. 880863-840022
Homepage : dprd_makassar.go.id Makassar 90222

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 926 /Sek. DPRD/IX/2017

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADWI AWAN UMAR, M. Si**
N i p : 19640910 199603 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Makassar
Instansi : Sekretariat DPRD Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **AGUSTIAWAN**
Nim : 10400113079
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Kampus : UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul
"PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI
DPRD KOTA MAKASSAR". Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 September 2017

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR

Drs. ADWI AWAN UMAR, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19640910 199603 1 003

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Indira Mulyasari P



Wawancara dengan Melani Mustari



Wawancara dengan Yeni Rahman



Wawancara dengan Hj. Haslinda

Rapat Paripurna



CURRICULUM VITAE



Penulis skripsi yang berjudul, “Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar” nama lengkap Agustawan, Nim : 10400113079, Anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H.Abdul Kadir S.IP dan Hj.Sitti Normah S.Pd

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SDN 30 Tongke-Tongke pada tahun 2002-2007, Sampai Penulis menempuh pendidikan di SMPN 2 Sinjai Timur di tahun 2007-2010, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Sinjai Utara tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Ujian Masuk Khusus dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, penulis saat ini menjadi dewan pendiri himpunan pemuda peduli pendidikan, Ketua komunitas Sahabat Rakyat Sinjai Priode 2016(sampai sekarang) Penulis Pernah Menjadi Ketua Ika Smansa 2014-2015 Penulis Juga Pernah Menjadi Pengurus Organisasi Bem Fsh, Periode 2014-2015, Penulis Saat ini Ikut Bergabung Menjadi Pengurus di DPP Hippmas Sinjai penulis juga saat ini menjadi Kader Partai DPC Perindo Sinjai,Selama Berproses Sebagai Mahasiswa, Penulis Banyak Menghabiskan Waktu di Tengah-Tengan Masyarakat Mengawal dan Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Persoalan yang di Hadapi Masyarakat Selama ini.